



Empat Kelurahan Terima Dana Bantuan Penataan Lingkungan

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak empat kelurahan di Kota Yogyakarta akan menjadi penerima bantuan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas dari pemerintah pusat pada tahun ini.

"Program bantuan dari pemerintah pusat tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas keberhasilan pengelolaan program yang sama di Kelurahan Karangwaru," kata Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta Hendra Tantular di Yogyakarta, Selasa (17/2).

Keempat kelurahan tersebut adalah Keparakan, Gowongan, Suryatmajan dan Ngampilan. Setiap kelurahan akan memperoleh bantuan dana untuk pengelolaan program sebesar Rp1 miliar.

Dana bantuan itu tidak langsung diturunkan sekaligus, namun secara bertahap. Pemerintah akan mengucurkan dana sekitar Rp200 juta hingga Rp250 pada tahap awal.

Dana tersebut digunakan untuk pembentukan tim pengelola program yang beranggotakan warga masyarakat setempat. "Tim itu bisa berisi tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Tim juga bertanggung jawab untuk menentukan target penataan termasuk mencari tenaga ahli untuk perencanaan," katanya.

Sedangkan sisanya sebesar Rp750 juta digunakan untuk pembangunan fisik. "Masyarakat secara mandiri melakukan pembangunan fisik tersebut," katanya.

Hendra menyebut, keputusan pemberian bantuan penataan lingkungan itu sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat meskipun rata-rata berada di kawasan bantaran sungai dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, lanjut dia, pengelolaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di setiap kelurahan akan disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.

Ia mencontohkan, Kelurahan Keparakan dan Suryatmajan yang dikenal sebagai sentra kerajinan dari kulit dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk membangun sarana pendukung pelestarian lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Chritiana Agustina berharap, jumlah wilayah yang menerima bantuan dana dari pusat bisa semakin bertambah.

"Pemerintah daerah perlu memikirkan strategi agar semakin banyak wilayah yang bisa memperoleh bantuan dana dari pusat dan masyarakat memperoleh manfaat dari program yang dilakukan," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Februari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005